

**Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah, Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja, dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di
Sumatera Barat**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
(S1) Pada Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Iniversitas Negeri Padang*



Oleh

AISYAH SAFITRI
2015/15060014

**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2019**

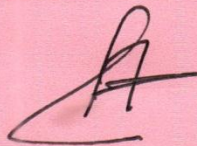
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH, INVESTASI SWASTA,
TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA, DAN INFLASI
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI SUMATERA BARAT**

Nama : Aisyah Safitri
NIM/TM : 15060014/2015
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Publik
Fakultas : Ekonomi

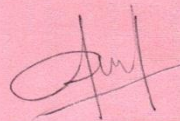
Padang, April 2019

Disetujui Oleh:
Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi



Drs. Ali Anis, MS
NIP. 19591129 198602 1001

Diketahui Oleh:
Pembimbing



Ariusni, SE, M.Si
NIP. 19770309 2008 01 2 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

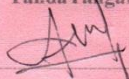
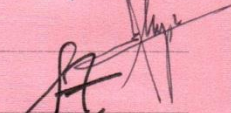
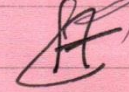
*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

**PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH, INVESTASI SWASTA,
TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA, DAN INFLASI
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI SUMATERA BARAT**

Nama : Aisyah Safitri
NIM/TM : 15060014/2015
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, April 2019

Tim Penguji:

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	: Ariusni, SE, M.Si	1. 
2	Anggota	: Dr. Alpon Satrianto, SE., ME	2. 
3	Anggota	: Drs. Ali Anis, MS	3. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Aisyah Safitri
NIM / TahunMasuk : 15060014/2015
Tempat / TanggalLahir : Singali/ 19 Februari 1997
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Kakak Tua 56B, Air Tawar Barat
No. HP / Telepon : 082283499058
Judul Skripsi : Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah, Investasi Swasta, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis / skripsi ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis / skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis / skripsi ini **Sah** apabila telah ditandatangani **Asli** oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis / skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di PerguruanTinggi.

Padang, Mei 2019
Yang menyatakan,



Aisyah Safitri
NIM.15060014

ABSTRAK

Aisyah Safitri (2015/ 15060014) : Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah, Investasi Swasta, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Barat, Universitas Negeri Padang, Dengan Dosen Pembimbing Ibu Ariusni ,SE.,M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara pengeluaran pemerintah, investasi swasta, dana perimbangan, tingkat partisipasi angkatan kerja dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dan asosiatif. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder dari tahun 1987 sampai tahun 2015 dengan teknik pengumpulan data dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis induktif. Pada analisis induktif terdapat beberapa uji yaitu: (1) Uji Regresi Linear Berganda; (2) Analisis Asumsi Klasik; (3) Uji t dan Uji F.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa; (1) Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat; (2); Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat (3) Investasi Swasta berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat; (4) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat; (5) Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan , maka disarankan pemerintah Sumatera Barat untuk terus memperhatikan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Beberapa cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan cara memperhatikan kinerja keuangan daerahnya guna untuk mengurangi ketimpangan antar daerah, membuat kebijakan- kebijakan dan program program yang dapat mengurangi jumlah penduduk pengangguran, serta mengontrol tingkat inflasinya.

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Dana Perimbangan, TPAK, Inflasi

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala karunia rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah, Investasi Swasta, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat”**. Shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sehingga kita dapat hijrah dari zaman jahiliyah menuju zaman yang diridhoi oleh Allah SWT.

Penyusunan skripsi ini adalah sebagai tugas akhir yang merupakan syarat untuk meraih gelar Sarjana Strata S-1 pada jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan, sehingga segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan penulis. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi diri penulis dan pihak-pihak terkait lainnya.

Selama proses penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Terkhusus kepada Ayah dan Umak untuk semua jasa- jasanya, kesabarannya, do'anya dan tidak pernah lelah dalam mendidik dan memberi cinta yang tulus dan ikhlas kepada penulis semenjak kecil dan keluarga besar yang telah memberikan banyak do'a, dukungan dan semangat kepada penulis dari awal pembuatan skripsi ini sampai selesai.
2. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas dan izin dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Drs. H. Ali Anis, MS selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Ariusni, SE,M.Si selaku pembimbing penulis yang telah memberikan bimbingan dan dengan sabar mendengar keluhan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Alpon Satrianto,SE, ME dan bapak Drs. Ali Anis,MS selaku tim penguji yang telah memberikan banyak masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibuk Dosen serta staf pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pengetahuan yang bermanfaat selama penulis melakukan perkuliahan.
7. Untuk geng OTO(cimar, ela, iin dan yusra) yang selalu ada dalam keadaan suka dan duka selama penyusunan skripsi sweet ini. Untuk yusra walaupun kita gak wisuda bareng semoga kamu nyusul yahh di wisuda periode berikutnya, tetep semangat dan selalu bersabar ☺.
8. Untukmu yang selalu memberikan do'a dan dukungan untukku dalam menyelesaikan tugas ini Muwahhid Ahmad.
9. Untuk Stella(Della), sahabatku di ekonomi Publik, yang selalu ada dalam pembuatan tugas dan selalu menemani dalam pengambilan data skripsi sweet ini, dan untuk tantenya kami (Anna) yang paling lemot dalam mencari laju pertumbuhan, yang selalu membuat tertawa di saat lelahnya menunggu dosen dan memberikan motivasi terbaiknya untuk tetap selalu jomblo.

10. Untuk geng Kost Kita Ajalah, teman sekelas di MAN, seangkatan di UNP walaupun kita beda jurusan(umpeng, latong, dan katek) semangat yah untuk penelitiaannya, semoga wisuda di periode wisuda selanjutnya gengs,untuk yusra semangat juga yah. Untuk teman sekamar Sakinah, semangat yah dek semoga kamu wisuda di maret 2020 jangan hiraukan anggapan remeh dari haters yahh. Untuk Rahma tersayang tetap semangat kuliahnya jangan malas-malas kuliahnya. Untuk Nurul, Yola dan Lina jangan ambil jatah teruss biar bisa wisuda tetap waktu.
11. Teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang angkatan 2015 tanpa terkecuali.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang. Selanjutnya penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi pembaca umumnya dan bagi penulis khususnya, Amin.Dengan tulus penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu, semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal bagi kita semua.

Padang, April 2019
Penulis

Aisyah Safitri
NIM. 15060014

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	
A. Kajian Teori	15
B. Penelitian Terdahulu yang Relevan	33
C. Kerangka Konseptual	37
D. Hipotesis.....	40
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Waktu dan Tempat Penelitian	42
C. Jenis Data dan Sumber Data	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
E. Defenisi Operasional terhadap Variabel yang Digunakan	43
F. Teknik Analisis Data.....	46
1. Analisis Deskriptif	46
2. AnalisisInduktif.....	47
3. PengujianHipotesis.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitaan.....	54
B. Pembahasan.....	84
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	101
A. Kesimpulan	101

B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	105
LAMPIRAN.....	109

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	2
Tabel 1.2	9
Tabel 2.1	34
Tabel 3.1	50
Tabel 4.1	59
Tabel 4.2	63
Tabel 4.3	66
Tabel 4.4	69
Tabel 4.5	71
Tabel 4.6	73
Tabel 4.7	81

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1	39
Gambar 4.1	75
Gambar 4.2	76
Gambar 4.3	77
Gambar 4.4	78
Gambar 4.5	79

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran I	109
Lampiran II	110
Lampiran III	111
Lampiran IV	113
Lampiran V	116

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan salah satu konsep yang digunakan dalam proses pembangunan wilayah. Perencanaan pembangunan adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk mengaplikasikan teori ke dalam kebijakan ekonomi dan program pembangunan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan yang optimal dan berkelanjutan. Dalam setiap pelaksanaan pembangunan daerah diharapkan pertumbuhan ekonomi yang meningkat yang disertai dengan pemerataan, yang akan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dilihat dari keberhasilan pembangunan yang mampu meningkatkan konsumsi masyarakat akibat pendapatan yang semakin meningkat.

Salah satu indikator untuk melihat capaian perekonomian suatu daerah atau wilayah dengan melihat data PDRB. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan PDRB atas harga konstan. Pada dasarnya perkembangan pembangunan perekonomian bertujuan untuk mencapai kemakmuran masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauhmana aktivitas perekonomian dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dalam kurun waktu tertentu, karena pada umumnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output.

Pertumbuhan ekonomi yang stabil akan berdampak pada semakin meningkatnya pendapatan penduduk yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang secara terus

menerus menggambarkan bahwa perekonomian wilayah tersebut berkembang dengan baik. Terjadinya kenaikan atau penurunan pertumbuhan ekonomi dilihat dari kenaikan atau penurunan dalam produksi barang dan jasa yang dihasilkan suatu daerah tertentu.

Tabel 1.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat (PDRB)
Tahun 2012- 2017(Dalam Persen)

Kabupaten/Kota		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kabupaten							
1	Kepulauan Mentawai	5,37	5,77	5,57	5,2	5,02	5,13
2	Pesisir Selatan	5,82	5,9	5,8	5,73	5,33	5,42
3	Kab.Solok	6,43	5,63	5,79	5,44	5,31	5,33
4	Sijunjung	6,15	6,14	6,02	5,69	5,26	5,27
5	Tanah Datar	5,61	5,85	5,79	5,33	5,03	5,12
6	Padang Pariaman	5,94	6,2	6,05	6,14	5,52	5,59
7	Agam	6,18	6,15	5,92	5,52	5,41	5,43
8	Lima Puluh Kota	6,15	6,23	5,98	5,61	5,32	5,34
9	Pasaman	6,01	5,82	5,87	5,34	5,07	5,09
10	Solok Selatan	6,04	6,13	5,9	5,35	5,12	5,15
11	Dharmasraya	6,19	6,51	6,34	5,75	5,42	5,45
12	Pasaman Barat	6,33	6,4	6,04	5,7	5,33	5,35
Kota							
1	Padang	6,16	6,66	6,46	6,41	6,22	6,23
2	Kota Solok	6,76	6,44	6,01	5,97	5,76	5,78
3	Sawahlunto	5,53	6,11	6,08	6,03	5,73	5,75
4	Padang Panjang	5,97	6,29	6,08	5,91	5,8	5,81
5	Bukittinggi	6,55	6,28	6,2	6,14	6,05	6,08
6	Payakumbuh	6,62	6,56	6,47	6,19	6,09	6,12
7	Pariaman	6,13	6,06	5,99	5,79	5,59	5,62
Mean		6,10	6,16	6,02	5,75	5,49	5,53

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, 2012- 2017

Pada tabel 1.1 menjelaskan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat selama periode 2012- 2017 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013- 2016 rata- rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten kota di Sumatera

Barat mengalami penurunan. Karena disebabkan berbagi faktor seperti krisis keuangan global yang berdampak pada negara berkembang terutama Indonesia dan Provinsi Sumatera Barat secara khusus. Sehingga perlambatan pertumbuhan ekonomi memberikan dampak terhadap pengeluaran pemerintah, dana perimbangan, investasi swasta, tingkat partisipasi angkatan kerja dan inflasi.

Pada tabel 1.1 pertumbuhan ekonomi tertinggi berada di kota Padang yaitu sebesar 6,22 persen pada tahun 2016 menurun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 6,41 persen pada tahun 2015. Pertumbuhan ekonomi terendah berada di kepulauan Mentawai dengan nilai 5,02 persen tahun 2016 menurun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,20 persen pada tahun 2015. Penurunan pertumbuhan ekonomi di Kota Padang dan Kepulauan Mentawai disebabkan penurunan tingkat daya beli masyarakat yang berdampak pada perlambatan tingkat konsumsi rumah tangga.

Perekonomian Sumatera Barat juga tidak terlepas dari peran pemerintah. Hal ini terlihat dari fungsi pengeluaran pemerintah yang dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi pada umumnya, pengeluaran yang dilakukan pemerintah ini digunakan untuk menciptakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat dalam proses pertumbuhan ekonomi, salah satunya yaitu dengan meningkatnya permintaan agregat yang akan mendorong kenaikan produksi.

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah serta proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya

nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan antara pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi.

Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Sumber pendapatan hasil daerah merupakan sumber keuangan daerah yang dgali dari wilayah daerah yang bersangkutan dan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dana perimbangan merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan penerimaan dari Sumber Daya Alam (SDA), serta Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dana pembangunan tersebut tidak bisa dipisahkan satu sama lain, mengingat tujuan masing-masing sumber tersebut pada dasarnya saling mengisi dan melengkapi.

Keberadaan penanaman modal atau investasi juga sangat diperlukan dalam suatu perekonomian. Investasi dalam pengertian fisik adalah pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan untuk meningkatkan stok barang modal, misanya untuk mendirikan pabrik, gedung atau bangunan baru, dan pembelian mesin atau peralatan (Rahardja dan Manurung, 2008). Dengan adanya investasi yang digunakan untuk pengadaan barang modal yang dierlukan dalam proses produksi,

akan meningkatkan kapasitas produksi, selanjutnya meningkatkan output dan akhirnya meningkatkan pendapatan suatu perekonomian.

Pada model pertumbuhan eksogen, peranan PMA terhadap perekonomian adalah sebagai penambah modal yang mendorong pertumbuhan sampai mencapai tingkat kondisi mapan (*steady state*) yang baru namun dampak yang ditimbulkan terhadap pertumbuhan tidak permanen (Worz, 2006). Pada teori pertumbuhan endogen, disamping perannya sebagai modal (kapital), PMA yang biasanya masuk ke suatu negara melalui perusahaan transnasional atau multinasional, membawa serta teknologi, proses manajemen dan lain-lain yang akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas, dan selanjutnya meningkatkan pertumbuhan *output* suatu perekonomian negara penerima investasi (Worz, 2006).

Faktor penyerapan tenaga kerja juga mempengaruhi terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi, menurut Solow (Mankiw, 2007:184) output dalam perekonomian tergantung pada persediaan modal dan angkatan kerja. Model Solow didasarkan pada fungsi produksi yang sudah dikenal yang menyatakan bahwa output dalam perekonomian tergantung pada persediaan modal dan tenaga kerja. Dengan penyerapan tenaga kerja dan penyediaan modal yang tinggi demi mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi meningkat, maka jumlah pengangguran akan berkurang karena penyerapan tenaga kerja yang semakin meningkat.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan salah satu faktor yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja tidak dapat dilihat secara

kasat mata, kualitas tenaga kerja dapat diukur dari tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimilikinya. Dalam hal ini, kualitas sumberdaya manusia diartikan dengan produktivitas kerja yang yang dapat dilihat dari sisi kreativitasnya maupun efektivitasnya.

Kesempatan kerja adalah banyak orang yang dapat tertampung untuk bekerja pada suatu unit usaha atau lapangan pekerjaan (BPS, 2017). Kesempatan kerja dilihat dari banyaknya orang yang mencari pekerjaan dengan tersediannya lapangan pekerjaan.

Inflasi merupakan kenaikan harga yang terjadi secara terus-menerus dalam suatu negara. Inflasi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya jumlah uang beredar dan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Dalam suatu perekonomian, antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi saling berkaitan. Apabila tingkat inflasi tinggi maka pertumbuhan ekonomi akan menurun, sebaliknya jika inflasi yang relatif rendah dan stabil dapat mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi.

Perkembangan tingkat inflasi dalam suatu negara dijadikan sebagai salah satu tolak ukur untuk melihat baik buruknya masalah ekonomi yang dihadapi oleh negara. Apabila inflasi meningkat maka negara akan mengalami penurunan kesejahteraan masyarakat, dimana inflasi yang tinggi akan menyebabkan turunnya pendapatan riil dan penurunan daya beli masyarakat terutama dirasakan oleh masyarakat yang memiliki penghasilan tetap yang akan mendekatkan pada tingkat kemiskinan.

Pada tabel 1.2 diketahui bahwa pengeluaran pemerintah mengalami fluktuasi. Laju pengeluaran tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 36,82 persen dan laju pengeluaran terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 3,23 persen. Sedangkan laju pengeluaran pemerintah pada tahun 2016 juga meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 11,98 persen dan tahun sebelumnya sebesar 9,60 persen. Dalam hal ini jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada tahun 2016 mengalami penurunan sedangkan pengeluaran pemerintah pada tahun tersebut mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa kejadian ini tidak sesuai dengan teori yang menyebutkan semakin besar pengeluaran pemerintah daerah yang produktif maka semakin tinggi tingkat perekonomian suatu daerah (Wibisono, 2003). Pengeluaran konsumsi pemerintah yang terlalu kecil akan merugikan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah yang tinggi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran konsumsi pemerintah yang boros akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Pada umumnya pengeluaran pemerintah membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.

Transfer pemerintah pusat ini merupakan salah satu sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah yang nantinya akan dilaporkan dalam perhitungan APBD. Tujuan dari transfer ini adalah mengurangi kesenjangan fiskal antar-pemerintahan dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh daerah (Simanjuntak, 2001). Pada tabel 1. 2 dapat dilihat bahwa dana transfer yang diterima pemerintah Sumatera Barat dari tahun 2012 sampai tahun 2016 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 mengalami peningkatan dari Rp. 1.390.876.415,38 menjadi 2.567.754.985,11.

Tetapi peningkatan pendapatan transfer yang diterima oleh pemerintahan Sumatera Barat pada tahun tersebut tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat pada tahun itu.

Pada tabel 1.2 juga memperlihatkan bahwa investasi swasta Sumatera Barat selama periode 2012- 2017 mengalami fluktuasi. Hal ini terlihat pada tahun 2013 laju investasi sebesar 57,92 persen meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 31,69 persen pada tahun 2012. Laju pertumbuhan investasi tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 34,45 persen ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar -78,28 persen. Peningkatan investasi yang terjadi pada tahun 2015 ternyata tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Dimana pada tahun 2015 laju pertumbuhan ekonomi menurun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 6,02% menjadi 5,74%.

Dalam tabel 1.2 tingkat partisipasi angkatan kerja dari tahun 2012 sampai dengan 2017 mengalami fluktuasi. Dimana TPAK tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 67,08%, sedangkan terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 62,92%. Pada tahun 2015 merupakan laju pertumbuhan investasi tertinggi tetapi pada tahun 2015 TPAK menurun dari tahun sebelumnya yaitu dari 65,19% menjadi 64,56 %. Dalam hal ini tidak sesuai dengan teori oleh yang menyebutkan bahwa jika investasi meningkat maka kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja juga akan meningkat (Sukirno: 2007).

Selain itu pada tabel 1.2 memperlihatkan tingkat inflasi di Sumatera Barat cenderung mengalami fluktuasi. Inflasi tertinggi di Sumatera Barat terjadi pada

tahun 2014 yaitu sebesar 11,58% dengan peningkatan sebesar 0,71% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 10,87%. Pada tahun 2016 inflasi Sumatera Barat kembali meningkat yang menyebabkan perekonomian semakin menurun. Dalam hal ini memperlihatkan bahwa peningkatan jumlah pengeluaran pemerintah tahun 2016 Sumatera Barat ternyata tidak mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, bahkan dengan peningkatan tersebut menyebabkan inflasi di Sumatera Barat semakin meningkat.

Tabel 1.2
Perkembangan Pengeluaran Pemerintah, Investasi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Pendapatan Asli Daerah dan Inflasi di Sumatera Barat Tahun 2012- 2017

Tahun	Pengeluaran Pemerintah (Ribu Rupiah)	Laju Pertumbuhan (%)	Dana Perimbangan (Ribu Rupiah)	Laju Pertumbuhan (%)	Investasi (Ribu Rupiah)	Laju Pertumbuhan (%)	TPAK(%)	Inflasi (%)
2011	2.400.184.172	-	897.640.879.000	-	65.456,99	-	65,33	5,37
2012	3.283.832.423	36,82	1.143.895.852.455	27,43	86.194,93	31,68	64,42	4,16
2013	3.390.063.931	3,23	1.006.512.924.567	-12,01	136.121,43	57,92	62,92	10,87
2014	3.670.029.774	8,26	1.333.059.018,23	-99,87	29.568,14	-78,28	65,19	11,58
2015	4.022.256.960	9,60	1.390.876.415,38	4,34	39.754,32	34,45	64,56	1,08
2016	4.504.037.259	11,98	2.576.754.985,11	85,26	79.298,10	99,47	67,08	4,89
2017	5.759.818.392	27,88	3.866.663.233,16	50,06	194.425,20	145,18	66,29	2,11

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, 2012- 2017

Perekonomian Sumatera Barat melambat pada tahun 2016. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada 2016 tercatat sebesar 5,49%, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,75%. Perlambatan pertumbuhan Sumatera Barat pada periode ini sejalan dengan pergerakan ekonomi nasional. Setelah selama 3 (tiga) triwulan berturut-turut (triwulan IV 2015 triwulan II 2016) menduduki posisi pertama di kawasan Sumatera, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada periode laporan hanya berada di posisi ke-4.

Dari sisi pengeluaran, sumber perlambatan terutama berasal dari kontraksi konsumsi pemerintah seiring dengan pemangkasan anggaran pemerintah pusat melalui penundaan transfer Dana Alokasi Umum (DAU) yang berdampak pada penghematan belanja pemerintah daerah. Kegiatan investasi terus melambat bahkan pertumbuhannya pada tahun 2016 terendah sejak tahun 2014. Masih minimnya insentif penanaman modal pihak swasta dan penundaan sejumlah proyek infrastruktur pemerintah menjadi faktor perlambatan investasi pada laporan tahunan. Dari sisi sektoral, kontraksi pertanian serta menurunnya kinerja lapangan usaha perdagangan dan industri pengolahan, menyebabkan perlambatan ekonomi pada tahun 2016. Faktor cuaca yang kurang kondusif menjadi pendorong utama berkurangnya produksi sektor pertanian hingga menyebabkan kontraksi yang cukup dalam lapangan usaha tersebut.

Realisasi belanja daerah juga melambat pada tahun 2016 sebagai imbas dari efisiensi pengeluaran pemerintah daerah pasca penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.125/PMK.07/2016 dan No.162/PMK.07/2016. Penghematan belanja pemerintah daerah tersebut tercermin dari penyerapan belanja pegawai

serta belanja barang dan jasa yang melambat dari 48,7% pada triwulan II 2016 menjadi 42,0% pada triwulan III 2016. Meskipun demikian, pengerjaan fisik proyek pemerintah menyebabkan realisasi belanja modal pada triwulan III 2016 membaik sehingga menahan perlambatan penyerapan belanja daerah lebih lanjut lagi.

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah tentang pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, investasi dan inflasi di Sumatera Barat, maka penulis tertarik untuk mengetahui apakah pengeluaran pemerintah, investasi dan inflasi berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat. Oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah, Investasi Swasta, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat”**.

B. Rumusan Masalah

Dari penyajian latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Sejauhmana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat?
2. Sejauhmana pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat?
3. Sejauhmana pengaruh investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat?
4. Sejauhmana pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat?

5. Sejauhmana pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat?
6. Sejauhmana pengaruh pengeluaran pemerintah, investasi swasta, dana perimbangan, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui pengaruh investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.
4. Untuk mengetahui tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.
5. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.
6. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah, investasi swasta, dana perimbangan, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

1. Bagi Penulis

Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

2. Bagi Pengambil Kebijakan

Dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi peneliti berikutnya, instansi dan pihak yang kompeten dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan hubungan pengeluaran yang dilakukan pemerintah, investasi serta inflasi.

3. Bagi Pengembang Ilmu Pengetahuan

Bagi riset yang akan datang di mana hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu referensi pengetahuan. Dimana Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu ekonomi terutama yang berkaitan dengan ekonomi makro dan ekonomi publik.

4. Bagi peneliti lain yang meneliti tentang pertumbuhan ekonomi.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Dalam kegiatan ekonomi fiskal di suatu negara, seperti jumlah dan produksi barang industri, perkembangan infrastuktur dan penambahan produksi lainnya.

Menurut Jhingan (2012), pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang- barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembangaan dan ideologis yang diperlukan.

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam memproduksi barang- barang dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjukkan pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto, atau pendapatan dan output perkapita.

Menurut Kuznet dalam Jhingan (2012 : 57) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang- barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh seiring dengan kemajuan teknologi, penyesuaian kelembangaan dan ideologi yang diperlukan. Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi secara umum dapat didefinisikan sebagai proses kenaikan

output suatu negara dalam jangka panjang yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya (Tadaro, 2003).

Output barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian bergantung pada kuantitas input yang tersedia, seperti *capital* dan tenaga kerja, produktifitas dari input tersebut. Hubungan antara output dan input dijelaskan dengan menggunakan fungsi produksi sebagai berikut (Nanga, 2005):

$$Y = A F (K, N) \dots\dots\dots (1)$$

Dimana:

Y= Total Output

K= Jumlah Kapital

N= Jumlah Tenaga Kerja

A= Produktifitas

Berdasarkan teori neoklasik yang dikemukakan oleh Robert M. Solow dan T. W Swan (Tarigan, 2005), Solow- Swan menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi capital, kemajuan teknologi, dan besarnya output yang saling berintegrasi. Solow- Swan menggunakan model fungsi produksi yang memungkinkan adanya substitusi antara capital (K) dan tenaga kerja (L). Pandangan ini dapat ditulus secara matematis sebagai berikut:

$$\Delta Y = f (\Delta K, \Delta L, \Delta T) \dots\dots\dots (2)$$

Dimana:

ΔY = Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

ΔK = Tingkat Pertumbuhan Modal

ΔL = Tingkat Pertumbuhan Penduduk

ΔT = Tingkat Pertumbuhan Teknologi

Dalam analisa neoklasik diyakini bahwa perkembangan faktor – faktor produksi dan kemajuan teknologi merupakan faktor utama yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu masa tertentu dan perkembangannya

dari satu waktu ke waktu lainnya dalam suatu negara. Dengan demikian, pada hakikatnya tidak berbeda dengan pandangan ahli- ahli ekonomi klasik yang juga berpendapat bahwa perkembangan faktor- faktor produksi terutama tenaga kerja dan modal merupakan faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto dan pendapatan Nasional Bruto tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah struktur ekonomi terjadi atau tidak. Faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah hubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk di ekspor akan menghasilkan kekayaan daerah dan pencipta peluang kerja (Arsyad, 2005).

Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan. Laju pertumbuhan PDRB akan memperlihatkan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Proses kenaikan output mengandung unsur dinamis, perubahan atau perkembangan. Oleh karena itu pemahaman indikator pertumbuhan ekonomi biasanya akan dilihat dalam kurun waktu tertentu, misalnya tahunan.

Aspek tersebut relevan untuk dianalisa sehingga kebijakan- kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah untuk mendorong aktivitas perekonomian domestik dapat di nilai efektifitasnya. Atas sudut pandang tersebut, penelitian ini menggunakan istilah pertumbuhan ekonomi yang akan dilihat dari sudut pandang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi

dapat diketahui dengan membandingkan PDRB pada satu tahun tertentu (PDRBt) dengan PDRB sebelumnya (PDRB-1).

2. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah pengeluaran- pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk membeli barang dan jasa akhir, dimana pengeluaran untuk tunjangan sosial tidak termasuk dalam perhitungan konsumsi pemerintah (Manurung, 2008). Jadi pengeluaran pemerintah itu merupakan pembelian berupa barang dan jasa oleh pemerintah untuk keperluan negaranya.

Pengeluaran pemerintah adalah konsumsi barang dan jasa yang dilakukan pemerintah serta pembiayaan yang dilakukan pemerintah untuk keperluan administrasi dan kegiatan- kegiatan pembangunan (Sukirno, 2004). Pengeluaran pemerintah merupakan komponen relatif paling kecil dibandingkan pengeluaran lain, namun efek yang ditimbulkannya cukup besar, baik secara fungsi alokasi, distribusi, maupun stabilitas. Pengeluaran pemerintah bersifat otonomi, karena penentuan anggaran pemerintah lebih pada: (a) pajak yang diharapkan; (b) pertimbangan politik; (c) permasalahan yang dihadapi (Samuelson & Nordhaus, 2004).

Pengeluaran pemerintah adalah barang dan jasa yang dibeli oleh pemerintah pusat, negara lain, dan daerah. Kelompok ini meliputi peralatan militer, jalan dan jasa yang diberikan pegawai pemerintah. Ini tidak termasuk pembayaran transfer kepada individu, seperti jaminan sosial dan kesejahteraan. Karena merealokasi pendapatan yang ada dan tidak memerlukan pertukaran barang dan

jasa, maka pembayaran transfer bukan merupakan bagian dari GNP(Mankiw, 2007;26).

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil digunakan sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah yang bersangkutan, dimana pengeluaran pemerintah ini dibedakan menjadi tiga golongan yaitu, pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa, pengeluaran pemerintah untuk belanja pegawai, serta belanja untuk *transfer payment*.

Ada dua kategori utama pengeluaran pemerintah yaitu *exhaustive* dan *exhausitive*. Pengeluaran *exhaisive* adalah belanja pemerintah yang mengkonsumsi atau mengeluarkan belanjanya untuk pengeluaran secara utuh, misalnya pembelian input (tenaga kerja) yang bisa digunakan dalam produksi barang dan jasa, dan bisa juga pembelian output sektor swasta (misalnya jasa kebersihan). Sehingga pengeluaran *exhaustive* ini mencakup belanja pegawai, belanja modal, belanja barang jasa, pemerintah pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja lain- lain. Pengeluaran *non- exhaustive* adalah pengeluaran yang mana pemerintah tidak membeli faktor produksi atau penggunaan sumberdaya. Komponen pengeluaran ini mencakup angsuran pinjaman/ hutang dan bunga, bantuan keuangan, bantuan sosial, hibah dan subsidi.

Pengeluaran pemerintah mempunyai dasarteori dari identitas pendapatan nasional yang merupakan legimitasi pandangan kaum Keynesian dan relevansi

campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Rumus Pendapatan Nasional berasal dari identitas sebagai berikut (Mankiw, 2007):

$$Y = C + I + G + (X - M) \dots \dots \dots (3)$$

Dimana:

Y= Pendapatan Nasional

C= Konsumsi

I= Investasi

G= Pengeluaran Pemerintah

(X- M)= Net Ekspor

Dapat dilihat peningkatan pengeluaran pemerintah berdampak pada kenaikan pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui pendapatan dan tingkat output. Pengeluaran pemerintah (G) mempunyai pengaruh positif terhadap besaran pendapatan nasional (Y), semakin besar G maka akan semakin besar pula Y. Perekonomian akan tumbuh karena adanya peningkatan pengeluaran pemerintah sebagaimana diterangkan dalam Keynesian Cross (Mankiw, 2003; 263).

Pengeluaran pemerintah lebih efektif mendorong pertumbuhan pendapatan karena pengeluaran merupakan investasi publik dan memiliki *multiplier effect* yang besar. Jika pengeluaran pemerintah tersebut produktif seperti pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, pembangkit listrik dan lain- lain, maka efeknya lebih besar dan berkesinambungan. Sebaliknya pengeluaran kurang produktif seperti subsidi yang tidak tepat sasaran atau biaya operasional kantor efeknya kerangbesar dan sesaat.

Klasifikasi belanja atau pengeluaran pemerintah dapat dikategorikan berdasarkan berbagai macam kriteria. Pengklasifikasian pengeluaran berguna

dalam analisis dan formulasi kebijakan, pengendalian anggaran (*Budgetary control*), dan akuntabilitas agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan program-program pembangunan yang telah direncanakan dapat tercapai secara terukur.

Menurut Mankiw (2007; 277) belanja pemerintah adalah salah satu komponen pengeluaran, maka belanja pemerintah yang direncanakan yang lebih tinggi mengakibatkan pengeluaran yang direncanakan yang lebih tinggi untuk semua tingkat pendapatan. Menurut fungsi konsumsi $C = C(Y - T)$, pendapatan yang lebih tinggi mengakibatkan konsumsi yang semakin tinggi. Ketika kenaikan belanja pemerintah meningkatkan pendapatan, itu juga akan mengakibatkan konsumsi yang selanjutnya meningkatkan pendapatan, kemudian meningkatkan konsumsi. Sehingga belanja pemerintah menyebabkan kenaikan pendapatan yang lebih besar, serta akan memberikan dampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

3. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah modal yang berasal dari perolehan APBN yang diperuntukkan bagi daerah dan upaya membiayai kepentingan daerah sebagai bentuk pengimplementasian atas desentralisasi. Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang ideal adalah apabila setiap tingkat pemerintahan dapat independendi bidang keuangan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing. Sidik 2000 dalam (Halim, 2004 : 35). Hal ini subsidi dan bantuan dari pemerintah pusat selama ini sebagai sumber utama dalam APBD, melalui kurang kontribusinya dan menjadi sumber utamanya adalah pendapatan dari daerah sendiri. Ada 3 fungsi pemerintah dalam pembangunan R. A Musgrave

(993: 6-7) yaitu fungsialokasi, distribusi, dan fungsi stabilitas, fungsi tersebut harus mendukung dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah untuk menjaga dan meningkatkan kesinambungan pembangunan.

Oleh karena itu, lahirnya undang- undang otonomi daerah merupakan perwujudan dari peran pemerintah dalam hal fungsi distribusi, yang bertujuan untuk pemerataan pendapatan dan kekayaan masyarakat serta pemerataan pembangunan dalam rangka memenuhi anggaran yang dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu bentuk distribusi tersebut, diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan yang diberikan kepada daerah dengan maksud untuk memenuhi keterbatasan keuangan daerah dalam menjalankan administrasi pemerintah dan pembangunan. Hal itu tercantum dalam Undang- Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 peraturan pemerintah Nomor 104 Tahun 2000, tentang dana perimbangan, dijelaskan bahwa salah satu penerimaan daerah berasal dari dana perimbangan yang bersumber dari dana APBN yang dialokasikan ke daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dalam hal pembangunan daerah.

Dana perimbangan terdiri dari:

- a. Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam;
- b. Dana Alokasi Umum
- c. Dana Alokasi Khusus

Dana perimbangan tersebut merupakan kelompok sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu sama lain, mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam merupakan alokasi yang pada dasarnya memperlihatkan potensi daerah penghasil.

Dana Alokasi Umum dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperlihatkan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah sehingga perbedaan antara daerah maju dengan yang belum berkembang dapat diperkecil.

Dan Alokasi Khusus bertujuan untuk membantu membiayai kebutuhan-kebutuhan khusus daerah. Dengan demikian, sejalan dengan tujuan pokok dan perimbangan dapat lebih memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, transparan, partisipatif, bertanggung jawab (akuntabel) serta memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah daerah yang bersangkutan.

Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan

pemerintah antar daerah sehingga setiap daerah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan danatransfer dari pusat sebagai pendapatan daerah.

Undang- Undang No. 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pamerintah dearah. Kebijakan perimbangan keuangan atau ditekankan pada empat tujuan utama, yaitu:

- a. Memberikan sumber dana bagi daerah otonom untuk melaksanakan urusan yang diserahkan yang menjadi tanggung jawab;
- b. Mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemeritah daerah, dan antar pemerinah daerah;
- c. Meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik dan mengurangi kesenjangan dan pelayanan publik antar daerah, serta
- d. Meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya daerah, khususnya sumber daya keuangan.

4. Investasi

Investasi secara umum berasal dari kata penanaman modal, yang merupakan salah satu komponen untuk menentukan tingkat pengeluaran agregat. Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang- barang modal dan perlengkapan- perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sukirno,2004).

Investasi juga dapat didefinisikan sebagai tambahan bersih terhadap stok kapital (*capital stock*). Istilah lain dari investasi adalah akumulasi modal (*capital formation*)(Nanga,2005). Dengan adanya investasi dalam perekonomian, maka akan terjadi pertumbuhan produksi barang- barang dan jasa- jasa yan telah ada karena membawa pengaruh terhadap konsumsi masyarakat. Sebab dengan adanya investasi, terutama dalam penambahan tenaga kerja yang berarti penambahan pengeluaran perusahaan untuk membayar upah dan gaji dengan perubahan pendapatan akan menambah pengeluaran masyarakat untuk konsumsi yang seiring dengan bertambahnya jumlah barang- barang yang ada dalam perekonomian.

Menurut Sukirno (2002;39) investasi adalah pengeluaran- pengeluaran untuk membeli barang- barang modal dan peralatan- peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang- barang dan modal dalam perekonomian yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dimasa yang akan datang.investasi memiliki 3 (tiga) peran yaitu:

- a. Merupakan salah satu kompenen pengeluaran agregat, dimana peningkatan investasi akan meningkatkan permintaan agregat dan pendapatan nasional.
- b. Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi dimasa depan dan perkembangan ini menstimulir pertumbuhan produksi nasional dan kesempatan kerja.
- c. Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi, sehingga akan memberikan kenaikan produktivitas dan pendapatan perkapita masyarakat.

Menurut Samuelson (2004; 136) dalam istilah makro ekonomi , investasi diartikan sebagai peningkatan barang modal berwujud dalam masyarakat baik peralatan, gedung atau persediaan. Investasi hanya terjadi apabila ada tambahan barang modal.

Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik mengartikan investasi sebagai suatu kegiatan penanaman modal pada berbagai kegiatan ekonomi dengan harapan untuk memperoleh keuntungan(benefit) pada masa- masa yang akan datang.

Penanaman modal di suatu daerah sangatlah penting karena proses pembangunan ekonomi memerlukan sumber modal, namun persediaan modal di daerah sangat terbatas, oleh karena itu diperlukan suntikan modal dari luar daerah. Untuk menunjang pembangunan ekonomi di suatu wilayah maka sangat diperlukan adanya sumber permodalan yang cukup besar untuk mendorong pergerakan usaha ekonomi masyarakat. Permodalan ini dapat dihimpun dari wilayah maka akan meningkatkan pendapatan wilayah itu sendiri. Menurut BPS (2003) dilihat dari institusi yang melakukan, investasi dapat dibedakan atas :

a) Investasi Swasta (*Private Investment*)

Investasi swasta merupakan investasi yang dilakukan oleh pihak swasta dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan (laba). Investasi swasta secara murni meliputi pembelian, penambahan dan pembetulan barang dan penambahan stok.

b) Investasi Pemerintah

Investasi pemerintah dilakukan tidak dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti jalan raya, irigasi, pelabuhan dan bandara dan sebagainya. Investasi ini juga disebut *Social Overhead Capital* (SOC). Keuntungan investasi publik ini adalah bertambahnya permintaan efektif dan menaikkan pendapatan masyarakat. Investasi pemerintah disebut juga sebagai investasi yang otonom., yaitu investasi yang timbul bukan karena adanya tambahan pendapatan.

Investasi yang dilakukan pemerintah melalui belanja pembangunan belanja modal memerlukan kebijakan dari pemerintah itu sendiri. Pemerintah mengatur sedemikian rupa kebijakan anggaran pengeluaran (rutin dan pembangunan) agar menunjang laju perekonomian.

Penanaman Modal Asing menurut UNCTAD dalam World Investment Report 2002 adalah” ivestasi yang melibatkan hubungan jangka panjang dan merefleksikan kepentingan dan control yang abadi dari suatu badan hukum di suatu perekonomian (investor langsung asing atau perusahaan induk) terhadap perusahaan di suatu perekonomian diluar investor asing (perusahaan FDI atau perusahaan afiliasi atau afiliasi asing).

Penanaman Modal Asing biasanya masuk dalam perekonomian melalui kehadiran perusahaan transnasional (*trans corporation* TNC) atau disebut juga

dengan perusahaan multinasional (*multinational corporation*) jika kepemilikannya melibatkan banyak negara. “ Perusahaan trans- nasional terdiri dari perusahaan berbadan hukum atau perusahaan yang tidak berbadan hukum yang terdiri dari perusahaan induk dan afliasi asingnya” (World Investment Report 2002, hal 291).

5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Mulyadi (2003:60) mendefinisikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah menggambarkan jumlah angkatan kerja dalam suatu kelompok umur sebagai persentasi penduduk dalam kelompok umur tersebut. Menurut Mangkunegara (dalam Perdana ,2014) partisipasi angkatan kerja” keterlibatan emosi dan mental pegawai dlam situasi kelompok yang menggiatkan mereka untuk menyumbang pada tujuan kelompok serta bertanggung jawab terhadap hal tersebut”. Berdasarkan defenisi tersebut terdapat tiga aspek yang sangat penting dalam partisipasi kerja, yaitu keterlibatan emosi dan mental pegawai, motivasi untuk menyumbang (kontribusi) dan penerimaan tanggung jawab.

Mulyadi (2003: 59) bahwa penduduk yang dianggap sebagai tenaga kerja yaitu penduduk dalam usia kerja (berusia 15- 64) yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Semakin besar penduduk usia kerja atau jumlah tenaga kerja dan semakin besar tingkat partisipasi angkatan kerjanya, berarti semakin besar jumlah angkatan kerja.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam

kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survey. Beberapa indikator yang dapat menggambarkan partisipasi angkatan kerja kerja:

- a. *General Ekonomi Activity Ratio* (Rasio Aktivitas Ekonomi Umum), rasio ini khusus untuk penduduk usia kerja, atau biasa tersebut Tingkat Partisipasi angkatan Kerja (TPAK). TPAK adalah indikator yang biasa digunakan untuk menganalisa partisipasi angkatan kerja.

Rumus:

$$TPAK = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100\% \dots\dots\dots(4)$$

- b. *Age- sex Specific activity Ratio* adalah persentase angkatan kerja terhadap penduduk per kelompok umur dan jenis kelamin (*age- sex- group*). Rumus:

$$TPAK = \frac{\text{Jumlah Tenaga Kerja Tiap Kelompok Umur}}{\text{Jumlah Penduduk tiap Kelompok Umur Jenis Kelamin}} \times 100\% \dots\dots\dots(5)$$

Rasio ini menggambarkan partisipasi angkatan kerja pada tiap kelompok umur dan jenis kelamin.

Konsep angkatan kerja adalah semua penduduk usia kerja yang masuk kedalam golongan yang menganggur atau sedang mencari pekerjaan. Sedangkan kategori bukan angkatan adalah individu yang sekolah, mengurus rumah tangga serta penerima pendapatan.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi angkatan kerja merupakan keikutsertaan tenaga kerja dalam bekerja. Partisipasi dalam

angkatan kerja keikutsertaan perempuan dalam bekerja, baik pada sektor formal maupun pada sektor informal.

Tenaga kerja merupakan salah satu indikator untuk melihat perkembangandan kondisi ekonomi suatu daerah. Menurut Todaro (2000: 56) pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan Angkatan Kerja (AK) secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi.

Modal manusia (*human capital*) merupakan salah satu faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Dengan modal manusia yang berkualitas kinerja ekonomi diyakini juga akan lebih baik. Tingkat pembangunan manusia yang tinggi akan mempengaruhi perekonomian melalui peningkatan kapabilitas penduduk dan konsekuensinya adalah juga pada produktifitas dan kreatifitas mereka.

6. Inflasi

Menurut Manurung (2005; 175), inflasi adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat secara umum dan terus-menerus. Jadi suatu keadaan dikatakan inflasi apabila terjadi pada waktu yang lumayan lama dan berkelanjutan. Inflasi merupakan peningkatan seluruh harga barang dan jasa yang terjadi karena permintaan tambahan yang besar dibandingkan dengan penawaran barang di pasar (Mankiw, 2003).

Menurut Rahardja dan Manurung (2005), inflasi adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus menerus. Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus-

menerus(Nopirin,2007). Dari definisi tersebut, maka kenaikan harga dari satu atau dua macam barang saja tidak bisa langsung disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada sebagian besar dari harga barang- barang lain. Inflasi merupakan kenaikan harga yang terjadi secara terus- menerus dan terjadi pada seluruh kelompok barang dan jasa.

Menurut Case and Fair (2007), inflasi adalah peningkatan harga keseluruhan. Inflasi terjadi ketika banyak barang naik secara serentak. Inflasi diukur dengan melihat jumlah barang dan jasa serta menghitung peningkatan rata-rata harganya selama beberapa periode.

Inflasi adalah suatu keadaan yang disebabkan oleh tidak adanya keseimbangan antara permintaan barang- barang dan persediaannya, yaitu permintaan melebihi persediaan dan semakin besar perbedaan itu semakin besar bahaya yang ditimbulkan oleh inflasi bagi perekonomian.

Jika terjadi inflasi yang terlalu tinggi maka akan menyebabkan perekonomian yang tidak baik karena sangat menyengsarakan masyarakat dalam suatu negara. Sebaliknya jika inflasi yang terjadi terlalu rendah juga sangat merugikan negara, maka dari itu kondisi inflasi yang wajarlah yang dapat memberikan keadaan positif bagi perekonomian suatu negara.

Inflasi memiliki dampak buruk, baik kepada individu, masyarakat dan kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Salah satu akibat penting dari inflasi adalah cenderung menurunkan taraf kemakmuran segolongan masyarakat(Sukirno,2004: 16). Sebagaimana diketahui bahwa pelaku ekonomi sebagian besar terdiri dari

pekerja yang bergaji tetap. Oleh karena itu, upah riil pekerja akan merosot disebabkan oleh inflasi dan keadaan ini akan membuat tingkat kemakmuran segolongan masyarakat mengalami kemerosotan yang berarti pertumbuhan ekonomi suatu negara juga akan menurun.

Menurut Sukirno (2002:16), prospek pembangunan ekonomi jangka panjang akan menjadi semakin buruk jika inflasi tidak dapat dikendalikan. Inflasi cenderung bertambah cepat apabila tidak dapat diatasi. Inflasi yang bertambah serius tersebut akan mengurangi investasi yang produktif, mengurangi ekspor dan menaikkan impor. Sehingga pertumbuhan ekonomi akan berjalan lambat seiring penurunan produktivitas suatu negara.

Menurut Nopirin(2000), ada beberapa indeks harga yang dapat digunakan untuk mengukur laju iflasi, adalah:

a. *Consumer Price Indeks (CPI)*

Merupakan indeks yang digunakan untuk mengukkur biaya atau pengeluaran rumah tangga membeli sejumlah barang bagi kebutuhan hidup.

b. *Produsen Price Indeks (PPI)*

Merupakan indeks yang lebih menitikberatkan pada perdagangan besar seperti harga barang mentah (*raw material*), barang baku atau barang setengah jadi.

c. GNP Deflator

Merupakan indeks inflasi yang mencakup jumlah barang dan jasa yang termasuk dalam hitungan GNP, sehingga jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan CPI dan PPI.

B. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu diperlukan dalam penelitian ini untuk dapat memperkaya teori dan referensi yang digunakan dalam pengkajian penelitian ini. Hasil dari penelitian terdahulu ini merupakan uraian pendapat atau hasil terdahulu dengan masalah yang diteliti.

Tabel 2.1 Matriks Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Shih- Ying Wu, dkk (2010), dengan judul “ <i>The Impact Of Government Expenditure On Economic Growth: How Ensitive To The Level Of Development?</i> ”.	Pertumbuhan ekonomi (PDB), dan pengeluaran pemerintah	Panel Garanger Causality	Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi
2	Sajid Anwar dan Sizhong Sun (2011), dengan judul “ <i>Financial Development, Foreign Investment And Economic Growth In Malaysia</i> ”.	pertumbuhan ekonomi, investasi asing dan pendapatan daerah	VECM	Tingkat perkembangan keuangan berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi di Malaysia .Peningkatan stok investasi asing di Malaysia telah berkontribusi meningkatkan pendapatan negara dan pertumbuhan ekonomi tetapi investasi asing hanya dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat keterbukaan ekonomi dan keuangannya nilai tukar riil.

3	Liming Hong (2014), dengan judul “ <i>The Dynamic Relationship Between Real Estate Investment And Economic Growth: Evidence From Prefecture City Panel Data In China</i> ”.	Pertumbuhan ekonomi (PDB), dan Investasi	GMM	Adanya hubungan positif yang lebih kuat antara investasi dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek sedangkan dalam jangka panjang negatif.
4	Muhammad Irfan Javaid Attari, Dan Attiya Y. Yaved (2013), dengan judul “ <i>Inflation,Economic GrowthAnd GovernmentExpenditure Of Pakistan: 1980-2010</i> ”.	Pertumbuhan ekonomi(GDP), PengeluaranPemerintah (G), BelanjaPemerintah (GC),Pengeluaran Pembangunan Pemerintah (GD),dan Inflasi(CPI)	ADF Unit root test	Adanya kausalitas antara inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengeluaran pemerintah
5	Been- Lon Chen,dkk (2016), dengan judul “ <i>Relation between growthand unemployment in a model with labor- force participation and adverselaborinstitutions</i> ”	Pengangguran (Y), Partisipasi angkatan Kerja (Y), Pertumbuhan ekonomi(Y)	Panel Garanger Causality	Adanya hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran. TetapiTingkat parsipasi angkatan kerja akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi,jika pasar tenaga kerja juga di tingkatkan.

6	S. Awaworyi Are, dan S.L Yew (2017), dengan judul “ <i>Government Transfer Harmful to Economic Growth? A Meta Analysis</i> ”	Transfer Pemerintah (X), jaminan sosial(X), Pertumbuhan ekonomi(Y)	A Meta Analysis	Adanya hubungan negated antara pertumbuhan ekonomi dan nada transfer pemerintah dan Ketika jaminan sosial tinggi, seperti di negara maju, jaminan sosial mengurangi tabungan dan penurunan pertumbuhan ekonomi.
7	Ram dan Zhang (2002), dengan judul” <i>The Effects Of Direct Investmen On The Host Country’s Economc Growth: Theory And Empirical Evidence</i> ”	Pertumuhan ekonomi (Y), FDI dan modal manusia (X)	OLS	Terdapat hubungan positif antara FDI yang cukup pesat terhadap pertumbuhan ekonomi nega tujuan investasi, maupun tidak ditemukan komplementari antara FDI dengan tingkat pendidikan di <i>host countries</i> .

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menentukan persepsi keterkaitan antara variabel yang diteliti berdasarkan permasalahan. Keterkaitan maupun hubungan antara variabel yang diteliti diuraikan dengan berpijak dari teori yang telah dikemukakan di atas. Keterkaitan variabel yang diteliti adanya hubungan antara Pengeluaran pemerintah (X_1), Investasi Swasta (X_2), Dana Perimbangan (X_3), Kesempatan Kerja (X_4), Inflasi (X_5), sebagai variabel bebas dan Pertumbuhan Ekonomi (Y) sebagai variabel terikat.

Pengeluaran pemerintah (X_1), memiliki peran penting dalam proses pertumbuhan ekonomi dalam hal ini berarti bahwa setiap pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika semakin tinggi pengeluaran pemerintah maka akan semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut dan begitu juga sebaliknya, jika semakin rendah pengeluaran pemerintah maka semakin rendah pertumbuhan ekonomi. Sehingga diduga bahwa pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Investasi Swasta (X_2), semua belanja yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya para pengusaha dengan tujuan mendapatkan laba. Dimana investasi ini berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Y), jika semakin tinggi investasi di tiap-tiap daerah maka akan semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi di wilayah

tersebut dan begitu juga sebaliknya jika semakin rendah investasi maka semakin rendah pertumbuhan ekonomi.

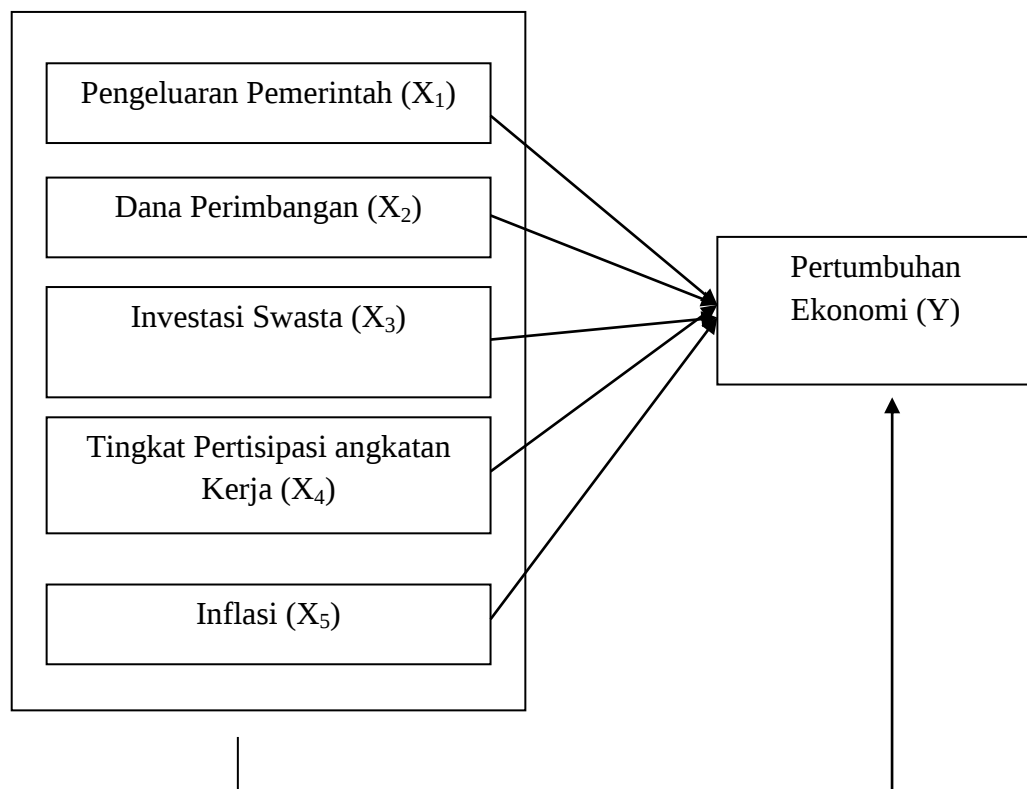
Dana transfer (dana perimbangan)(X_3) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antara untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dihitung dengan membandingkan jumlah pendapatan transfer dengan total pendapatan daerah.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (X_4), keadaan yang menggambarkan jumlah angkatan kerja dalam suatu kelompok umur sebagai persentase penduduk dalam kelompok umur tersebut. Jika semakin besar penduduk usia kerja atau jumlah tenaga kerja maka semakin besar tingkat partisipasi angkatan kerjanya, berarti semakin besar jumlah angkatan kerja.

Inflasi (X_5), pertumbuhan ekonomi yang terlalu cepat akan mengakibatkan inflasi. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap inflasi, sehingga apabila pertumbuhan ekonomi suatu negara meningkat maka akan menurunkan tingkat inflasi yang terjadi dalam suatu negara dan begitu juga sebaliknya. Ketika inflasi mengalami peningkatan maka akan menyebabkan turunnya pertumbuhan ekonomi. Sehingga hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi adalah negatif.

Pertumbuhan ekonomi (Y), yaitu proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses kenaikan

kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional yang diukur dengan satuan persen. Tingginya laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah mengindikasikan kesejahteraan rakyat daerah tersebut. Untuk lebih jelasnya lagi akan penelitian ini, maka uraian di atas dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi, dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi

D. Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

1. Pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq 0$$

2. Dana Perimbangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.

$$H_0 : \beta_3 = 0$$

$$H_a : \beta_3 \neq 0$$

3. Investasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.

$$H_0 : \beta_2 = 0$$

$$H_a : \beta_2 \neq 0$$

4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.

$$H_0 : \beta_4 = 0$$

$$H_a : \beta_4 \neq 0$$

5. Inflasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.

$$H_0 : \beta_5 = 0$$

$$H_a : \beta_5 \neq 0$$

6. Pengeluaran pemerintah, investasi, dana perimbangan, tingkat partisipasi angkatan kerja dan inflasi secara bersama-sama memiliki hubungan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = 0$$

$$H_a : \text{salah satu koefisien regresi } \beta \neq 0$$

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada perhitungan OLS (Ordinary Least Square), serta melakukan transformasi perhitungan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Pengeluaran pemerintah menggunakan data belanja yang dilakukan pemerintah Sumatera Barat berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Pengeluaran pemerintah ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, dimana ketika peningkatan pengeluaran pemerintah akan memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan, sehingga dengan adanya pekerjaan maka masyarakat akan memperoleh pendapatan yang akan meningkatkan konsumsinya serta akan mendorong peningkatan output dan memberikan dampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.
2. Dana perimbangan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Peningkatan dana perimbangan akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Dengan adanya peningkatan dana perimbangan ini akan mendukung peningkatan pelayanan publik yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.

3. Investasi swasta menggunakan data Realisasi PMA berpengaruh positif dan tidak signifikan. Ketika investasi penanaman modal asing yang dilakukan di Sumatera Barat meningkat maka pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat juga akan meningkat. Namun dalam penelitian ini peningkatan investasi PMA di Sumatera Barat tidak mampu meningkatkan Perekonomian di Sumatera Barat.
4. Tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Tingginya tingkat partisipasi angkatan kerja tidak akan menambah keuntungan bagi suatu daerah tanpa diimbangi produktifitas tenaga kerja yang tinggi dan tercukupinya lapangan kerja yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan perekonomian yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.
5. Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Tingkat inflasi yang tinggi akan menurunkan perekonomian di Sumatera Barat.
6. Pengaruh pengeluaran pemerintah, investasi, dana perimbangan tingkat partisipasi angkatan kerja dan inflasi merupakan faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian dan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya serta dari hasil penelitian ini dan kesimpulan yang di peroleh, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi merupakan cerminan keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pemerintah Provinsi Sumatera Barat di harapkan mampu mendorong kegiatan ekonomi masyarakat pada semua sektor ekonomi, baik dari segi peraturan daerah maupun penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang lebih baik.
2. Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan kinerja keuangan daerahnya guna untuk mengurangi tingkat ketimpangan antar daerah di Sumatera Barat, alokasi anggaran yang diberikan diharapkan mampu mendorong agar pembangunan antar daerah mampu meningkatkan perekonomian yang lebih cepat.
3. Pemerintah diharapkan memperbaiki atau meningkatkan kebijakan dalam menentukan arah kebijakan yang berhubungan dengan penanaman modal asing di daerah Sumatera Barat.
4. Untuk meningkatkan perekonomian di Sumatera Barat diperlukan kebijakan-kebijakan dan program-program yang dapat mengurangi jumlah penduduk miskin dan pengangguran di Sumatera Barat dengan membukakannya lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang menganggur. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang tumbuh tiap tahunnya dengan pembekalan pendidikan, dan keterampilan melalui pelatihan sehingga mampu bersaing di pasar tenaga kerja.

5. Pemerintah diharapkan dapat memberikan atau mengeluarkan kebijakan yang mengontrol tingkat inflasi karena tingkat inflasi yang tinggi memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.
6. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk dapat menambah variabel atau indikator yang lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aimon, Hasdi. 2012. *“Analisis Kausalitas Pengeluaran Pemerintah Sektor Publik Dengan Perekonomian Daerah Provinsi Sumatera Barat”*. Staf Pengajar Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang.
- Akhirmen. 2005. *Statistik I*. Universitas Negeri Padang.
- Alkadri. 2008. *Analisis Pengaruh Investasi Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah*. Tesis..
- Anwar, Sajid dan sizhong Sung. 2011. *“Financial Development, Foreign Investment And Economic Growth In Malaysia”*. Journal of Asian Economics 22 (2011) 335- 342.
- Arsyad, Lincolin. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Aditya Media. Yogyakarta
- Attari, Muh Irfan dan Attiya. 2013. *“Inflation, Economic Growth And Government Expenditure OfPakistan: 1980- 2010”*. Procedia Economic and Finance 5 (2013)58- 67.
- Badan Pusat Statistik. 2012. *Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Barat*, BPS.
- 2013. *Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Barat*. BPS.
- 2014. *Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Barat*. BPS.
- 2015. *Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Barat*. BPS.
- 2016. *Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Barat*. BPS.
- 2017. *Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Barat*. BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2012. *Sumatera Barat Dalam Angka 2012*, BPS.
- 2013. *Sumatera Barat Dalam Angka 2013*. BPS.
- 2014. *Sumatera Barat Dalam Angka 2014*. BPS.
- 2015. *Sumatera Barat Dalam Angka 2015*. BPS.
- 2016. *Sumatera Barat Dalam Angka 2016*. BPS.
- 2017. *Sumatera Barat Dalam Angka 2017*. BPS.
- Case, Karl E dan Fair Ray C. 2007. *Prinsip-Prinsip Ekonomi*. Edisi Kedelapan. Alih Bahasa Wibi Hardani dan Devri Barnadi. Jakarta: Erlangga.